

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 308 orang mempunyai tugas dan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Permentan No. 43 Tahun 2014 terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

A. 1.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi yaitu ***"Menjadi pengawas Intern mitra proaktif pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"***.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.

- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.3. SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks akuntabilitas pembangunan pertanian
2. Meningkatkan nilai maturitas penerapan SPI Kementerian Pertanian
3. Meningkatkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) Inspektorat Jenderal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Instansi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah satuan kerja di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah satu satuan kerja yaitu satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai yang tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) pada entitas Pemerintah Pusat .
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengadakan 4 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA.2016

Uraian	2016	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	15,000,000	15,000,000
Jumlah Pendapatan	15,000,000	15,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	21,482,906,000	22,168,205,000
Belanja Barang	73,342,629,000	66,319,341,000
Belanja Modal	5,568,363,000	5,168,363,000
Jumlah Belanja	100,393,898,000	93,655,909,000

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp238.269.718,00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2016 adalah senilai Rp238.269.718,00 atau mencapai 1.588,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan PNBPN yang terdiri dari Pendapatan Lelang dan Pendapatan Lain-lain. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2016

Akun	Uraian	31 Desember 2016	
		Anggaran	Realisasi
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	-	103.348.990
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	4.065.435
4239	Pendapatan Lain-lain	15.000.000	130.855.293
	Total	15.000.000	238.269.718

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2016 senilai Rp238.269.718,00, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan dan Pengelolaan BMN senilai Rp103.348.990,00 yaitu:
 - Pendapatan Lelang 2 unit kendaraan roda 4 yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp99.898.990,00, dengan Risalah Lelang No158/2016 tanggal 17 Juni 2016.
 - Pendapatan lelang BMN Rusak berat senilai Rp1.650.000,00 dengan Risalah Lelang No.201/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 - Pendapatan lelang BMN Rusak berat senilai Rp1.800.000,00 dengan Risalah Lelang No. 222/2016 tanggal 09 September 2016.
- b. Pendapatan luran Denda Penyelesaian Pekerjaan Renovasi Ruang pada tahun 2015 senilai Rp4.065.435,00.
- c. Pendapatan lain lain senilai Rp130.855.293,00 terdiri dari :
 - b.1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp36.707.400, yaitu :
 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan uang makan bulan Desember 2015 senilai Rp25.067.400,00.
 - Pendapatan senilai Rp.6.360.000,00 dari Pengembalian kelebihan Tunjangan Fungsional senilai Rp7.500.000,00, setelah dikurangi kekurangan Tunjangan Umum senilai Rp1.140.000,00.
 - Pendapatan dari pengembalian tunjangan jabatan struktural pegawai ex.PPHP senilai Rp5.280.000,00 yang dipotong melalui potongan SPM Gaji senilai Rp440.000,00 per bulan (Januari-Desember 2016).
 - b.2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp93.767.008,00, yaitu :
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 senilai Rp8.479.100,00.
 - Kelebihan pembayaran akom untuk kegiatan Upsus dalam rangka Swasembada Pangan yang dilaksanakan di Kupang tahun 2015 senilai Rp351.300,00.
 - Kelebihan pembayaran rehab Ruang Rapat Tahun Anggaran 2015 senilai Rp84.936.603,00.
 - b.3. Pendapatan lain-lain senilai Rp380.885,00 yang merupakan potongan lain-lain dari aplikasi Gaji.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Akun	URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103,348,990	65,400,000	37,948,990	58.03
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,065,435	1,786,785	2,278,650	0.00
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	36,707,400	30,667,100	6,040,300	19.70
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	93,767,008	3,300,000	90,467,008	2741.42
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	380,885	90,886	289,999	0.00
		Rp 238,269,718	Rp 101,244,771	137,024,947	135.34

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan senilai Rp137.024.947 atau 135,34% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena di Tahun 2016 terdapat kenaikan pendapatan dari lelang/penjualan BMN dan adanya kelebihan pembayaran kegiatan Itjen dan kelebihan pembangunan rehab ruangan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pada Tahun 2016 tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Negara
Rp77.450.501.469,00

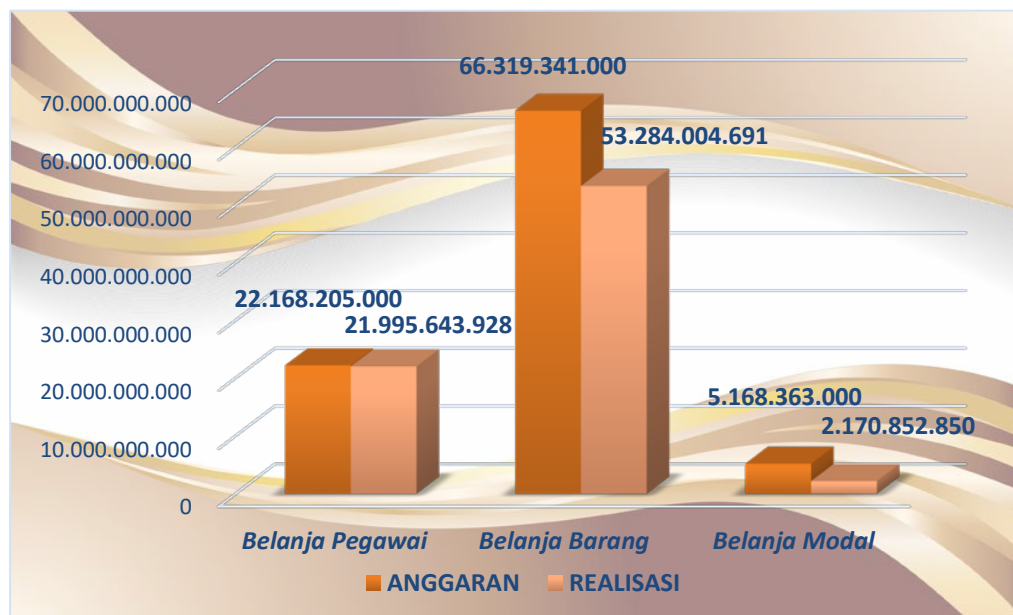
Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (netto) per 31 Desember 2016 senilai Rp77.450.501.469,00 atau 82,70% dari anggaran senilai Rp93.655.909.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp244.382.170,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	22,168,205,000	22,034,712,294	99.40
52	Belanja Barang	66,319,341,000	53,489,318,495	80.65
53	Belanja Modal	5,168,363,000	2,170,852,850	42.00
Total Belanja Kotor (Bruto)		93,655,909,000	77,694,883,639	82.96
Pengembalian Belanja			(244,382,170)	
Total Belanja Bersih (Netto)		93,655,909,000	77,450,501,469	82.70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Netto) per 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

KODE JENIS BELANJA	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015	Rp	%
51	Belanja Pegawai	21,995,643,928	19,917,483,677	2,078,160,251	10.43
52	Belanja Barang	53,284,004,691	77,924,454,982	(24,640,450,291)	(31.62)
53	Belanja Modal	2,170,852,850	9,180,202,900	(7,009,350,050)	(76.35)
Jumlah Belanja		77,450,501,469	107,022,141,559	(29,571,640,090)	(27.63)

Realisasi Belanja (Netto) yang berakhir 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp29.571.640.090,00 atau 27,63% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden tentang Penghematan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (*Self Blocking*), sehingga ada beberapa kegiatan dan pengadaan yang tidak dapat direalisasikan.

Rincian Anggaran per Belanja Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan Penghematan (*Self Blocking*) sebagai berikut :

**Rincian Anggaran Belanja yang dilakukan Penghematan (*Self Blocking*)
Tahun Anggaran 2016**

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Nilai Pagu Awal	Self Blocking	Nilai Pagu Setelah Self Blocking
51	Belanja Pegawai	22,168,205,000	-	22,168,205,000
52	Belanja Barang	66,319,341,000	9,032,750,000	57,286,591,000
53	Belanja Modal	5,168,363,000	2,890,750,000	2,277,613,000
Jumlah Belanja		93,655,909,000	11,923,500,000	81,732,409,000

Dengan adanya Penghematan Anggaran (*Self Blocking*), maka Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 adalah 94,76% dari pagu anggaran setelah penghematan (*Self Blocking*) senilai Rp81.732.409.000,00

Belanja Pegawai
Rp21.995.643.928,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (netto) adalah Realisasi Belanja Pegawai pertanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2016 senilai Rp21.995.643.928,00 atau sebesar 99,22% dari Pagu Anggaran senilai Rp22.168.205.000,00, setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai senilai Rp39.068.366,00.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15,298,750,000	15,297,690,580	99.99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	234,000	179,919	76.89
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,089,414,000	1,088,154,740	99.88
Belanja Tunjangan anak PNS	329,855,000	329,518,864	99.90
Belanja Tunjangan Struktural PNS	449,840,000	449,810,000	99.99
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,695,920,000	1,695,910,000	100.00
Belanja Tunjangan PPH PNS	303,570,000	303,530,991	99.99
Belanja Tunjangan Beras PNS	777,319,000	776,968,200	99.95
Belanja Uang Makan PNS	1,347,718,000	1,217,780,000	90.36
Belanja Tunjangan Umum PNS	309,205,000	309,015,000	99.94
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	436,780,000	436,555,000	99.95
Belanja Uang Lembur	129,600,000	129,599,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	22,168,205,000	22,034,712,294	99.40
Pengembalian Belanja Pegawai		(39,068,366)	
Jumlah Bersih	22,168,205,000	21,995,643,928	99.22

Pengembalian belanja pegawai senilai Rp39.068.366,00 merupakan setoran pengembalian belanja tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengembalian Belanja Gaji Pokok a.n. Alm. Maryati selama 3 bulan senilai Rp6.245.442,00.
- b. Pengembalian Belanja Pembulatan senilai Rp664,00.
- c. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional Auditor senilai Rp32.080.000,00.
- d. Pengembalian Belanja Tunjangan Beras a.n. Alm. Maryati selama 3 bulan senilai Rp217.260,00.
- e. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp525.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp21.995.643.928,00 dan Rp19.917.483.677,00. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp2.078.160.251,00 atau 10,43% dibandingkan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai pindahan dari PPHP sebanyak 21 orang dan pembayaran gaji ke 14 pada bulan Juli 2016.

**Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Kenaikan / Penurunan	
	31 Desember 2016	31 Desember 2015	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15,297,690,580	13,328,780,280	1,968,910,300	14.77
Belanja Pembulatan Gaji PNS	179,919	287,101	(107,182)	(37.33)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,088,154,740	1,031,654,698	56,500,042	5.48
Belanja Tunjangan anak PNS	329,518,864	319,622,592	9,896,272	3.10
Belanja Tunjangan Struktural PNS	449,810,000	483,030,000	(33,220,000)	(6.88)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,695,910,000	1,745,950,000	(50,040,000)	(2.87)
Belanja Tunjangan PPH PNS	303,530,991	428,335,337	(124,804,346)	(29.14)
Belanja Tunjangan Beras PNS	776,968,200	788,468,280	(11,500,080)	(1.46)
Belanja Uang Makan PNS	1,217,780,000	1,011,659,000	206,121,000	20.37
Belanja Tunjangan Umum PNS	309,015,000	255,075,000	53,940,000	21.15
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	436,555,000	396,904,000	39,651,000	9.99
Belanja Uang Lembur	129,599,000	127,751,000	1,848,000	1.45
Jumlah Belanja Kotor	22,034,712,294	19,917,517,288	2,117,195,006	10.63
Pengembalian Belanja Pegawai	(39,068,366)	(33,611)		
Jumlah Bersih	21,995,643,928	19,917,483,677	2,078,160,251	10.43

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp53.284.004.691,00 atau 80,34% dari Pagu Anggaran senilai Rp66,319.341.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp205.313.804,00.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	909,000,000	902,912,154	99.33
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	198,000,000	196,214,336	99.10
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	113,760,000	108,147,000	95.07
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	266,400,000	263,600,000	98.95
Belanja Barang Operasional Lainnya	311,791,000	60,325,000	19.35
Belanja Bahan	134,450,000	126,552,000	94.13
Belanja Honor Output Kegiatan	368,100,000	79,155,000	21.50
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,307,626,000	872,716,500	66.74
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,821,058,000	1,374,475,745	75.48
Belanja Langganan Telepon	92,400,000	51,067,036	55.27
Belanja Sewa	544,861,000	359,456,000	65.97
Belanja Jasa Profesi	465,000,000	299,000,000	64.30
Belanja Jasa Lainnya	400,000,000	-	0.00
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,484,000	227,486,700	95.39
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,796,260,000	1,790,100,469	99.66
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,882,000	107,071,550	97.44
Belanja Perjalanan Biasa	47,473,492,000	39,739,828,235	83.71
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,164,150,000	1,007,930,000	86.58
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,102,260,000	907,541,000	82.33
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,782,117,000	4,677,914,400	68.97
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	720,250,000	337,825,370	46.90
Jumlah Belanja Kotor	66,319,341,000	53,489,318,495	80.65
Pengembalian Belanja Barang		(205,313,804)	
Jumlah Belanja Bersih	66,319,341,000	53,284,004,691	80.34

Pengembalian belanja barang senilai Rp205.313.804,00 merupakan setoran pengembalian belanja perjalanan dinas selama tahun berjalan.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp53.284.004.691,00 dan Rp77.924.454.982,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp24.600.450.291,00 atau 31,62% dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden tentang penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (*Self Blocking*) pada belanja perjalanan dinas.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	902,912,154	869,915,000	32,997,154	3.79
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	196,214,336	187,158,484	9,055,852	4.84
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108,147,000	87,977,000	20,170,000	22.93
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	263,600,000	295,815,000	(32,215,000)	(10.89)
Belanja Barang Operasional	60,325,000	4,235,000	56,090,000	1,324.44
Belanja Bahan	126,552,000	1,099,687,750	(973,135,750)	(88.49)
Belanja Honor Output Kegiatan	79,155,000	280,280,000	(201,125,000)	(71.76)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	872,716,500	1,390,870,500	(518,154,000)	(37.25)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,374,475,745	-	1,374,475,745	-
Belanja Langganan Telepon	51,067,036	62,328,856	(11,261,820)	(18.07)
Belanja Sewa	359,456,000	508,672,207	(149,216,207)	(29.33)
Belanja Jasa Profesi	299,000,000	901,750,000	(602,750,000)	(66.84)
Belanja Jasa Lainnya	-	125,728,300	(125,728,300)	(100.00)
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227,486,700	219,789,500	7,697,200	3.50
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,790,100,469	1,676,395,151	113,705,318	6.78
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,071,550	45,680,100	61,391,450	134.39
Belanja Perjalanan Biasa	39,739,828,235	57,151,209,673	(17,411,381,438)	(30.47)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,007,930,000	693,080,000	314,850,000	45.43
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	907,541,000	137,360,000	770,181,000	560.70
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,677,914,400	12,327,523,222	(7,649,608,822)	(62.05)
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	337,825,370	986,549,500	(648,724,130)	(65.76)
Jumlah Belanja Kotor	53,489,318,495	79,052,005,243	(24,913,962,618)	(31.52)
Pengembalian Belanja Baran	(205,313,804)	(1,127,550,261)		
Jumlah Belanja Bersih	53,284,004,691	77,924,454,982	(24,640,450,291)	(31.62)

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp2.076.307.850,00

B.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp2.076.307.850,00 atau sebesar 95,19% dari Pagu Anggaran senilai Rp2.181.270.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal peralatan dan mesin.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,166,300,000	2,070,277,850	95.57
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	14,970,000	6,030,000	40.28
Jumlah Belanja Kotor	2,181,270,000	2,076,307,850	95.19
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	2,181,270,000	2,076,307,850	95.19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.076.307.850,00 dan Rp221.539.400,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp Rp3.718.229.050,00 atau 64,17% dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena penghematan anggaran belanja modal.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,070,277,850	5,781,546,900	(3,711,269,050)	(64.19)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	6,030,000	12,990,000	(6,960,000)	(53.58)
Jumlah Belanja Kotor	2,076,307,850	5,794,536,900	(3,718,229,050)	(64.17)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-	-
Jumlah Belanja Bersih	2,076,307,850	5,794,536,900	(3,718,229,050)	(64.17)

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan

Rp94.545.000,00

B.2.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp94.545.000,00 atau 3,79 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp2.496.343.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal gedung dan bangunan.

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2016 senilai Rp2.496.343.000,00 direncanakan untuk Rehap Gedung B Lantai II dan III. Namun karena adanya efisiensi anggaran maka pada tahun 2016 proses rehab selanjutnya tidak jadi dilaksanakan. Tetapi jasa konsultan perencana rehab untuk proses Rehab Gedung B Lantai II dan III sudah teralisasi senilai Rp94.545.000,00, sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2016 hanya terealisasi senilai Rp94.545.000,00 atau 3,79 persen dari anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	10,200,000	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,486,143,000	94,545,000	3.80
Jumlah Belanja Kotor	2,496,343,000	94,545,000	3.79
Pengembalian Belanja Modal		-	
Jumlah Belanja Bersih	2,496,343,000	94,545,000	3.79

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp94.545.000,00 dan Rp2.719.956.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.625.411.000,00 atau 96,52% dibandingkan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2016 hanya terealisasi sebesar Rp94.545.000,00 atau 3,79 persen dan termasuk anggaran yang sisanya dilakukan penghematan (*Self Blocking*).

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	2,730,000	(2,730,000)	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	94,545,000	2,717,226,000	(2,622,681,000)	(96.52)
Jumlah Belanja Kotor	94,545,000	2,719,956,000	(2,625,411,000)	(96.52)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	94,545,000	2,719,956,000	(2,625,411,000)	(96.52)

Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
(JIJ) nihil

B.2.5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

Realisasi Belanja Modal JIJ (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah nihil, karena pada tahun 2016 tidak dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal JIJ (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,00 dan Rp34.500.000,00.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal JIJ
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal JIJ	-	34,500,000	(34,500,000)	-
Jumlah Belanja Kotor	-	34,500,000	(34,500,000)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	34,500,000	(34,500,000)	-

Belanja Modal
Aset Lainnya
nihil

B.2.7. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah nihil.

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan dibulan Oktober untuk pengadaan software (Microsoft Office) untuk 45 unit Laptop yang pengadaanya dilaksanakan tahun 2016. Namun karena waktu pelaksanaan kontrak atas pengadaan software tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga tidak dapat terealisasi pada tahun 2016.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	490,750,000	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	490,750,000	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal		-	
Jumlah Belanja Bersih	490,750,000	0	0.00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing nihil.

Belanja Modal
Lainnya nihil

B.2.6. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2016 adalah nihil, karena pada tahun 2016 tidak dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,00 dan Rp631.210.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	631,210,000	(631,210,000)	-
Jumlah Belanja Kotor	-	631,210,000	(631,210,000)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	631,210,000	(631,210,000)	-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp493.067.747,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp493.067.747,00 dan Rp343.752.487,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut :

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

No	Aset Lancar	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	146,600,000	-
2	Belanja Dibayar Dimuka	-	41,046,500
3	Persediaan	346,467,747	302,705,987
Jumlah		493,067,747	343,752,487

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp146.600.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp146.600.000,00 dan Rp0,00, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum diperpertanggungjawabkan atau setorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Pada akhir tanggal pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran masih ada sebesar Rp146.600.000,00 karena adanya kesalahan pengajuan Revisi DIPA, yang seharusnya revisi tersebut diajukan ke Kanwil DJA tapi hanya melakukan Revisi POK, sehingga data Revisi tidak terbaca dalam data SPAN dan muncul sisa pagu minus karena ada realisasi yang melebihi pagu. Mengingat tanggal 10 Januari 2016 adalah batas akhir pertanggungjawaban TUP Tahun 2016, maka dilakukan revisi SPM, sehingga pada 31 Desember 2016 secara akrual masih terdapat sisa kas senilai

Rp146.600.000,00. Dan sisa kas tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 10 Januari 2017. (Surat Setoran terlampir).

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2016**

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Uang Tunai di brankas Bendahara Pengeluaran	Rp 146,600,000	Rp -
Saldo direkening Bank Mandiri a.n.BPG 139 Itjen Kementan per 31 Desember 2016	Rp -	Rp -
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016	Rp 146,600,000	Rp -

Belanja Dibayar
Dimuka Rp0,00

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.046.500,00 .

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja di Bayar Dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Belanja Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2015**

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	Rp 32,567,400
	a. Kelebihan Uang Makan bulan Desember 2015	Rp 25,067,400
	b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional	Rp 7,500,000
2	Belanja Barang Dibayar Dimuka	Rp 8,479,100
	Kelebihan Beban Perjalanan Dinas	Rp 8,479,100
Jumlah		Rp 41,046,500

Belanja di bayar Dimuka senilai Rp41.046.500,00 telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelebihan Uang Makan bulan Desember 2015 telah disetorkan melalui SSBP NTPN No. 9709C2DJFQRAJKNO, tanggal 23 Februari 2016 senilai Rp25.067.400,00.
- b. Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional tahun 2015 telah disetorkan senilai Rp6.360.000,00 (setelah dikurangi kekuarangan tunjangan umum senilai Rp1.140.000,00) melalui SSBP dengan NTPN No. 7F0222D8LG3M7UNO tanggal 23 Februari 2016 senilai Rp3.630.000,00 dan NTPN No. B4B162DC2KICTTNO tanggal 23 Februari 2016 senilai Rp2.730.000,00.
- c. Kelebihan Beban Perjalanan Dinas tahun 2015 senilai Rp8.479.100,00 melalui SSBP dengan rincian ;
 - NTPN No.71AF57FPVVD6PK1O tanggal 15 Januari 2016 senilai Rp386.600,00.
 - NTPN No.DC6897G2B4UH0Q1O tanggal 15 Januari 2016 senilai Rp652.500,00.
 - NTPN No.F3F117G45BJ5L21O tanggal 15 Januari 2016 senilai Rp2.410.000,00.
 - NTPN No.5C40037JVEB2GQP8 tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp4.750.000,00.
 - NTPN NoE263D331H4P45SLO tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp280.000,00.

Persediaan
Rp346.467.747,00

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah senilai Rp346.467.747,00 dan Rp302.705.987,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan pada neraca per 31 Desember 2016 berdasarkan hasil stock opname yang tersaji pada lampiran. Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

**Rincian Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Barang Konsumsi	Rp 302,357,465	Rp 269,618,051
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 1,021,250	Rp 1,851,045
3	Suku Cadang	Rp 196,780	Rp 42,330
4	Persediaan Lainnya	Rp 42,892,252	Rp 31,194,561
Jumlah		Rp 346,467,747	Rp 302,705,987

Rekapan Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

saldo persediaan per 31 Desember 2015		302,705,987
Mutasi Tambah		
Pembelian	1,406,582,222	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	49,003,381	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(22,956,046)	
Total Mutasi Tambah		1,432,629,557
Mutasi Kurang		
Pemakaian		
Beban Persediaan Konsumsi	(1,142,284,251)	
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	(57,379,406)	
Beban Persediaan Suku Cadang	(5,814,620)	
Beban Persediaan Lainnya	(183,389,520)	
Total Pemakaian		(1,388,867,797)
Saldo Persediaan per 31 Desember 2016		346,467,747

Aset Tetap
Rp7.618.514.627,00

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap (Netto setelah Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah senilai Rp7.618.514.627,00 dan Rp7.809.162.964,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	Rp 24,500,062,985	Rp 23,099,290,699	Rp 1,400,772,286
2	Gedung dan Bangunan	Rp 295,276,960	Rp 295,276,960	Rp -
3	Aset Tetap Lainnya	Rp 106,861,055	Rp 106,861,055	Rp -
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 94,545,000	Rp -	Rp 94,545,000
	Jumlah	Rp 24,996,746,000	Rp 23,501,428,714	Rp 1,495,317,286
	Akum. Penyusutan	Rp (17,378,231,373)	Rp (15,692,265,750)	Rp (1,685,965,623)
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 7,618,514,627	Rp 7,809,162,964	Rp (190,648,337)

Peralatan dan Mesin
Rp24.500.062.985,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp24.500.062.985,00 dan Rp23.099.290.699,00 .

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	23,099,290,699.00
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	Rp	2,085,157,850.00
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	558,780,000.00
- Transfer Masuk	Rp	478,731,856.00
Mutasi Tambah	Rp	3,122,669,706.00
Mutasi Kurang :		
- Usulan Rusak Berat dipengelola	Rp	1,721,897,420.00
Mutasi Kurang	Rp	1,721,897,420.00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	24,500,062,985.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Rp	(17,363,467,527.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	7,136,595,458.00

(Nilai buku per 31 Desember 2016 sesuai dengan nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 pada tabel Penyusutan Aset Tetap).

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi Tambah

Mutasi Tambah senilai Rp3.122.669.706,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penambahan dari pembelian Rp2.085.157.850,00 yaitu total realisasi belanja Peralatan dan Mesin per 30 September 2016 senilai Rp2.070.277.850,00 ditambah pengadaan rak besi senilai Rp14.880.000,00 yang menggunakan MAK 521111.

**Pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2016**

No	Tanggal SPPD	No. SPPD	Nilai SPM	Jenis Belanja	Rincian Barang	Asal Perolehan	Harga Satuan	Unit	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2/1/2016	161391302000297	49,300,000	532111	Lemari Kayu Jati	CV. Putra Amiras Jaya	24,800,000	1	24,800,000			
					Lemari Kayu Jati	Kuitansi.12/PAJ/Kiut/1/2016 tanggal 25 Januari 2016	24,500,000	1	24,500,000			
					Total							49,300,000
2	2/24/2016	161391301001572	24,979,350	532111	Antivirus Kaspersky 201	Berkat Cahaya Abadi	449,350	30	13,480,500			
					Printer A3 Color	Kuitansi.04.01/BCA-PIKWT/1/2016 tanggal 29 Januari 2016	8,226,350	1	8,226,350			
					Hraddisk Internal		3,272,500	1	3,272,500			
Total								24,979,350				
3	2/24/2016	161391301001573	17,594,500	532111	Digita Voice Recorder	Berkat Cahaya Abadi	2,370,500	5	11,852,500			
					Jam Dinding	Kuitansi.01.01/BCA-PIKWT/1/2016 tanggal 29 Januari 2016	1,815,000	1	1,815,000			
					Mesin Tik Manual		1,963,500	2	3,927,000			
Total								17,594,500				
4	3/21/2016	161391303002739	310,314,000	532111	Pesawat Telp	Bhinneka Mentari Dimensi	419,000	7	2,933,000			
					Mesin Fax	SP.006/SP/H.1/1/2016 tanggal 29 Januari 2016	1,694,000	1	1,694,000			
					Mesin Laminating		679,000	1	679,000			
					TV LED Monitor		4,499,000	1	4,499,000			
					Panaboard		22,140,000	5	110,700,000			
					Camera DSLR		28,600,000	1	28,600,000			
					TV LED Monitor		18,599,000	1	18,599,000			
					Mesin Binding (jilid)		5,300,000	1	5,300,000			
					TV LED Monitor		2,460,000	1	2,460,000			
					UPS		899,000	150	134,850,000			
Total								310,314,000				
5	3/28/2016	161391303002738	1,058,800,000	532111	Printer	Bhinneka Mentari Dimensi	3,450,000	10	34,500,000			
					Mesin Fotocopy	SP.004/SP/H.1/1/2016 tanggal 29 Januari 2016	60,500,000	3	181,500,000			
					Notebook		17,800,000	1	17,800,000			
					Notebook		18,750,000	44	825,000,000			
Total								1,058,800,000				
6	5/23/2016	161391302014040	143,000,000	532111	Sound System	CV. Metkomp Solusi Informasi SPK.No.018/SPK/H.1/III/2016 Tanggal 32 Maret 2016	143,000,000	1	143,000,000			
					Total							143,000,000
7	5/23/2016	161391303007803	466,290,000	532111	Compak Rolling System	PT. Khronz Indonesia SPK No.010/SPK/H.1/IV/2016 Tanggal 4 April 2016	39,332,500	6	235,995,000			
					Compak Rolling		57,098,750	4	228,395,000			
					Filling Cabinet		1,900,000	1	1,900,000			
					Total							466,290,000
8	23-08-2016	161390301007504	205,900,700	521111	Pengadaan rak besi	CV. Putra Amiras Jaya Kuitansi . 23/PAJ/Kuit/8/2016 Tanggal 23 Maret 2016	14,880,000	1	14,880,000			
					Total							14,880,000
					TOTAL							2,085,157,850

- b. Pengembangan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp558.780.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- b.1. Honor Pengelola teknis peralatan dan mesin senilai Rp6.030.000,00.

**Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2016**

No.	Tanggal SP2D	No. SP2D	Nilai SPM	MAK	Rincian Barang	Harga Satuan	Unit	Jumlah
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	2/29/2016	161391302001864	2.310.000	532113	Honor pengelola teknis peralatan Mesin			
					- Printer/NUP 206	1.155.000	1	1.155.000
					- Hardisk/NUP 239	1.155.000	1	1.155.000
					Total			2.310.000
2	2/29/2016	161391302001865	1.860.000	532113	Honor pengelola teknis peralatan Mesin			
					- Jam Dinding/NUP 5	620.000	1	620.000
					- Mesin Tik Manual /NUP 4	620.000	1	620.000
					- Mesin Tik Manual /NUP 5	620.000	1	620.000
					Total			1.860.000
3	15/11/2016	161391302050304	1.860.000	532113	Honor Pemeriksa Pengadaan Compac Rolling	1.860.000	1	1.860.000
Total Honor Upah pengelolah teknis dan Pemeriksa Pengadaan Peralatan dan Mesin								6,030,000

- b.2. Reklas dari Aset Tak Berwujud berupa software Microsoft Office pengadaan tahun 2015 senilai Rp552.750.000,00.
- c. Transfer Masuk dari Setjen senilai Rp478.731.856,00 berupa :
- c.1. Aset-aset Tetap Ex. PPHP senilai Rp453.757.856,00 yang diserahkan dari Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretaris Itjentan dengan Berita Acara Serah Terima No.2308/BAST/PL.030/A4/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. (*Berita Acara Serah Terima terlampir*).
- c.2. Aset berupa 2 unit Laptop senilai Rp24.974.000,00 yang diserahkan dari Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretaris Itjentan dengan Berita Acara Serah Terima No.3186/PL.130/BAST/A4/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016. (*Berita Acara Serah Terima terlampir*).

Mutasi Kurang

Mutasi Kurang senilai Rp1.721.897.420,00 merupakan penghentian aset peralatan dan mesin dari penggunaan karena kondisinya sudah rusak berat, dicatat dalam SIMAK BMN sebagai Usulan Aset Rusak Berat di Pengelola. Tidak tercatat dalam neraca, berdasarkan surat usulan rusak berat ke pengelola dan dihentikan dari penggunaannya (surat terlampir).

(*Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran.*)

Gedung dan
Bangunan
Rp295.276.960,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah senilai Rp295.276.960,00 dan Rp295.276.960,00. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Bangunan gudang tertutup permanen milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan proses pengerjaannya telah diselesaikan pada tahun 2014.

(Nilai buku per 31 Desember 2016 sesuai dengan nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 tabel Penyusutan Aset Tetap).

(Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran)

Aset Tetap Lainnya
Rp106.861.055,00

C.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp106.861.055,00 dan Rp106.861.055,00.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 senilai Rp106.861.055,00 yang merupakan saldo awal tahun 2016 yang berupa buku-buku perpustakaan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp94.545.000,00

C.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp94.545.000,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jasa konsultan perencana rehab Gedung B Lantai II dan III. Karena adanya program efisiensi belanja pemerintah maka dilakukan *Pemblokiran Mandiri (Self Blocking)* terhadap anggaran pembangunan rehab ruang kerja Itjentan sehingga pada tahun ini proses rehab selanjutnya tidak dapat dilaksanakan.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(17.378.231.373,00)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp(17.378.231.373,00) dan Rp(15.692.265.750,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 24,500,062,985	Rp 17,363,467,527	Rp 7,136,595,458
2	Gedung dan Bangunan	Rp 295,276,960	Rp 14,763,846	Rp 280,513,114
3	Aset Tetap Lainnya	Rp 106,861,055	Rp -	Rp 106,861,055
Akumulasi Penyusutan		Rp 24,902,201,000	Rp 17,378,231,373	Rp 7,523,969,627

Piutang Jangka
Panjang
Rp15.074.250,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.074.250,00 dan Rp0,00.

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 senilai Rp15.074.250,00 merupakan Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara.

Rincian Piutang Jangka Panjang pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	15,150,000	-
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(75,750)	-
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	15,074,250	-
Jumlah		15,074,250	-

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp15.150.000,00*

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp15.150.000,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan kepada Bendahra akibat kelalaian atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 adalah sisa piutang tagihan TGR kepada Pegawai limphan dari PPHP yang saat ini menjadi pegawai di Inspektorat Jenderal yang dikarenakan adanya kelebihan pembayaran tunjangan fungsional oleh PUMK Gaji di PPHP, saat yang bersangkutan masih menjadi Pegawai di PPHP.

Berikut Perhitungan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran tunjangan Fungsional untuk 29 bulan @Rp750.000,00	21,750,000.00
Potongan Gaji selama 3 bulan di PPHP @Rp440.000,00	(1,320,000.00)
Potongan Gaji selama 12 bulan di Itjentan @Rp440.000,00	(5,280,000.00)
Sisa Piutang per 31 Desember 2016	15,150,000.00

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp(75.750,00)

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp(75.750,00) dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dapat dikategorikan lancar karena pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui potongan gaji dari PUMK Gaji. Berikut perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 :

$$\text{Rp}15.150.000,00 \times 0,005 = \text{Rp}75.750,00$$

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Netto)
Rp15.074.250,00

C.3.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp15.074.250,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah selisih saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .

Aset Lainnya
Rp58.756.250,00

C.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya (Netto setelah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp58.756.250,00 dan Rp896.678.678,00.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 340,586,500	Rp 896,678,678	Rp (556,092,178)
2	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	Rp (281,830,250)	Rp -	Rp (281,830,250)
Nilai Buku Aset Lainnya		Rp 58,756,250	Rp 896,678,678	Rp (837,922,428)

Aset Tak Berwujud
Rp340.586.500,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp340.586.500,00 dan Rp896.678.678,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Inspektorat Kementerian Pertanian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	Rp	896,678,678.00
Mutasi Tambah :		
Mutasi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang :		
- Reklas ke Aset Peralatan dan Mesin	Rp	552,750,000.00
- Transfer Keluar	Rp	3,342,178.00
Mutasi Kurang	Rp	556,092,178.00
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	340,586,500.00
Akumulasi Penyusutan per 30 September 2016	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	340,586,500.00

Transfer Keluar senilai Rp3.342.178,00 berupa software Reporting Tools untuk aplikasi Intradata dari Setjen yang ditransfer keluar untuk dilakukan proses penghapusan di Setjen, dengan Berita Acara Serah Terima No.B.1035/PL.040/G.I/09/2016 tanggal 1 September 2016 yang diserahterimakan dari Sekretaris Itjentan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen. (Berita Acara Serah Terima terlampir). Rincian Saldo awal Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2016**

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI
1	Aplikasi Program SIM	2008	Rp 51.240.000
2	SIM Membangun Software	2008	Rp 50.490.500
3	Software Pengembangan Sistem Informasi untuk MONEV	2008	Rp 33.946.000
4	Software Pengembangan Sistem Informasi untuk LHP	2008	Rp 36.415.000
5	Software Knowledge Management (Website Itjentan)	2008	Rp 39.985.000
6	Aplikasi Digital Signnage	2015	Rp 15.550.000
7	Pengembangan Website Itjentan	2015	Rp 34.500.000
8	Pengadaan Dashboard Itjentan	2015	Rp 29.500.000
9	Pengadaan System Informasi Pengawasan	2015	Rp 48.960.000
Total			Rp 340.586.500

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(281.830.250,00)

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp(281.830.250,00) dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2016**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Aklm. Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	Rp 340,586,500	Rp 281,830,250	Rp 58,756,250
	Rp 340,586,500	Rp 281,830,250	Rp 58,756,250

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp146.600.000,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tersaji sebesar Rp146.600.000,00 dan Rp1.140.000,00 .

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan sebagai berikut :

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp -	Rp 1,140,000
Uang Muka dari KPPN	Rp 146,600,000	Rp -
Jumlah	Rp 146,600,000	Rp 1,140,000

*Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp0,00*

C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp1.140.000,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 merupakan Tunjangan Umum yang belum dibayarkan kepada 2 (dua) pegawai Itjentan yang seharusnya diberhentikan tunjangan Fungsionalnya dari bulan Oktober 2015 dan digantikan dengan tunjangan umum yang berlaku mulai bulan tersebut

Pada tanggal 23 Februari 2016 kekurangan tunjangan umum ini telah dibayarkan melalui pengembalian tunjangan Fungsional senilai Rp7.500.000,00 dikurangi Rp1.140.000,00 untuk membayar kekurangan tunjangan umum, sehingga kelebihan yang dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp6.360.000,00, melalui SSBP.

*Uang Muka dari KPPN
Rp146.600.000,00*

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 tersaji sebesar Rp146.600.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN Jakarta V sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal Pelaporan.

Ekuitas

Rp8.038.812.874,00

C.6. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp8.038.812.874,00 dan Rp9.048.454.129,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp0,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.446.320,00 dan Rp1.877.671,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

URAIAN	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Denda Keterlambatan	4,065,435	1,786,785	2,278,650	127.53
Pendapatan Lain-lain	380,885	90,886	289,999	319.08
Jumlah	4,446,320	1,877,671	2,568,649	136.80

Pendapatan Operasional PNPB per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp2.586.649,00 atau 42,23 persen dibandingkan per 31 Desember 2015 karena pada tahun 2016 pembayaran denda keterlambatan pekerjaan untuk rehab ruang Itjentan lebih besar dibanding tahun 2015.

Beban Pegawai
Rp22.027.071.328,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp22.027.071.328,00 dan Rp19.916.723.377,00.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Gaji Pokok PNS dan Pembulatan	15,291,624,393	13,329,033,770	1,962,590,623	14.72
Beban Tunjangan-Tunjangan	6,169,292,935	6,063,034,607	106,258,328	1.75
Beban Gaji Pokok Non PNS	436,555,000	396,904,000	39,651,000	9.99
Beban Lembur	129,599,000	127,751,000	1,848,000	1.45
Jumlah	22,027,071,328	19,916,723,377	2,110,347,951	10.60

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 senilai Rp22.027.071,00 terdiri dari beban-beban sebagai berikut :

- a. Beban Gaji Pokok PNS dan Pembulatan senilai Rp15.291.624.393,00, yaitu Beban Gaji Pokok PNS senilai Rp15.291.445.138,00 (Beban Gaji Pokok senilai Rp15.297.690.580,00 dikurangi pengembalian beban pembulatan senilai Rp6.245.442,00) dan Beban Pembulatan Gaji PNS senilai Rp179.255,00 (Beban Beban Pembulatan Gaji PNS senilai Rp179.919,00 dikurangi pengembalian beban pembulatan senilai Rp664,00).
- b. Beban Tunjangan-tunjangan senilai Rp6.169.292.935,00 yang terdiri dari :
 - Beban Tunjangan Suami/Istri senilai Rp1.088.154.740,00.
 - Beban Tunjangan Anak senilai Rp329.518.862,00.
 - Beban Tunjangan Struktural senilai Rp449.810.000,00.
 - Beban Tunjangan Fungsional senilai Rp1.671.330.000,00 (Beban Tunjangan Fungsional senilai Rp1.703.410.000,00 dikurangi pengembalian beban tunjangan fungsional senilai Rp32.080.000,00).
 - Beban Tunjangan PPh senilai Rp303.530.991,00.
 - Beban Tunjangan Beras senilai Rp776.750.940,00 (Beban Tunjangan Beras senilai Rp776.968.200,00 dikurangi pengembalian beban tunjangan Beras senilai Rp217.260,00).
 - Beban Tunjangan Uang Makan senilai Rp1.242.847.400,00.
 - Beban Tunjangan Umum senilai Rp307.350.000,00 (Beban Tunjangan Umum senilai Rp307.875.000,00 dikurangi Pengembalian Beban Tunjangan Umum senilai Rp524.000,00).
- c. Beban Gaji Pokok Non PNS senilai Rp436.555.000,00 merupakan gaji pegawai kontrak sebanyak 11 orang.

d. Beban Lembur senilai Rp129.599.000,00.

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp2.110.347.951,00 atau 10,60 persen dibanding beban gaji per 31 Desember 2015 karena adanya pembayaran gaji ke 14 yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri.

Penjelasan Beda LRA dan LO Belanja Pegawai

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Pegawai (51)			Keterangan
			LO	LRA	Selisih	
01	511111	Belanja/Beban Gaji Pokok PNS	15,297,690,580	15,297,690,580	-	
02	511111	Pengembalian Belanja/Beban Gaji Pokok PNS	(6,245,442)	(6,245,442)		
03	511119	Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	179,919	179,919	-	
04	511119	Pengembalian Belanja/Beban Pembulatan Gaji PNS	(664)	(664)		
05	511121	Belanja/Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	1,088,154,740	1,088,154,740	-	
06	511122	Belanja/Beban Tunjangan Anak PNS	329,518,864	329,518,864	-	
07	511123	Belanja/Beban Tunjangan Struktural PNS	449,810,000	449,810,000	-	
08	511124	Belanja/Beban Tunjangan Fungsional PNS	1,703,410,000	1,695,910,000	7,500,000	adanya Jurnal Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional (debit) pada Belanja Pegawai dibayar dimuka (kredit) senilai Rp7.500.000,00 karena terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional dari bulan Oktober s.d Desember 2015
09	511124	Pengembalian Belanja/Beban Tunjangan Fungsional PNS	(32,080,000)	(32,080,000)	-	
10	511125	Belanja/Beban Tunjangan PPH PNS	303,530,991	303,530,991	-	
11	511126	Belanja/Beban Tunjangan Beras	776,968,200	776,968,200	-	
12	511126	Pengembalian Belanja/Beban Tunjangan Beras	(217,260)	(217,260)	-	
13	511129	Belanja/Beban Uang Makan PNS	1,242,847,400	1,217,780,000	25,067,400	adanya Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan Pegawai (debit) pada Belanja Pegawai dibayar dimuka (kredit) senilai Rp25.067.400,00 karena untuk melakukan jurnal balik pada bulan Februari 2016 terhadap pengembalian kelebihan uang makan Desember tahun 2015
14	511151	Belanja/Beban Tunjangan Umum PNS	307,875,000	309,015,000	(1,140,000)	adanya Jurnal Balik Penyesuaian yaitu Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (debit) pada Beban Tunjangan Umum PNS (kredit) senilai Rp1.140.000,00 karena terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Umum dari bulan Oktober s.d Desember 2015
15	511151	Pengembalian Belanja/Beban Tunjangan Umum PNS	(525,000)	(525,000)	-	
16	511511	Belanja/Beban Gaji Pokok Non PNS	436,555,000	436,555,000	-	
17	512211	Belanja/Beban Uang Lembur	129,599,000	129,599,000	-	
Total			22,027,071,328	21,995,643,928	31,427,400	

Pada Tahun 2016 Beban Pegawai pada LO lebih besar nilainya dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai pada LRA. Realisasi Beban Pegawai adalah Rp22.027.071.328,00 sedangkan Realisasi Belanja Pegawai adalah Rp21.995.643.928,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp31.427.400 yang dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan pada beban pegawai akibat adanya lebih dan kurang bayar di tahun 2015.

Beban Persediaan
Rp1.325.673.771,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.325.673.771,00 dan Rp910.793.004,00.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	1,142,284,251	809,300,161	332,984,090	41.14
Beban Persediaan Lainnya	183,389,520	101,492,843	81,896,677	80.69
Jumlah Beban Persediaan	1,325,673,771	910,793,004	414,880,767	45.55

Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp414.880.767,00 atau 45,55 persen dibanding beban Persediaan per 31 Desember 2015 karena meningkatnya permintaan kebutuhan ATK kantor dan obat-obatan pada klinik Itjentan.

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.415.413.699,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.415.413.699,00 dan Rp4.682.709.801,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Jasa per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	1,195,395,163	399,364,975	796,030,188.00	199.32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	187,158,484	(187,158,484.00)	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108,147,000	87,977,000	20,170,000.00	22.93
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	263,600,000	295,815,000	(32,215,000.00)	(10.89)
Beban Barang Operasional Lainnya	60,325,000	4,235,000	56,090,000.00	1,324.44
Beban Bahan	126,552,000	641,556,950	(515,004,950.00)	(80.27)
Beban Honor Output Kegiatan	79,155,000	280,128,000	(200,973,000.00)	(71.74)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	872,716,500	1,187,995,029	(315,278,529.00)	(26.54)
Beban Langganan Telepon	51,067,036	62,328,856	(11,261,820.00)	(18.07)
Beban Sewa	359,456,000	508,672,207	(149,216,207.00)	(29.33)
Beban Jasa Profesi	299,000,000	901,750,000	(602,750,000.00)	(66.84)
Beban Jasa Lainnya	-	125,728,300	(125,728,300.00)	(100.00)
JUMLAH	3,415,413,699	4,682,709,801	(1,267,296,102.00)	(27.06)

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.267.296.102,00 atau 27,06 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015, karena adanya instruksi Presiden tentang penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Pejelasan Beda LRA dan LO Belanja Barang dan Jasa

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Barang dan Jasa			Keterangan
			LO	LRA	Selisih	
01	521111	Belanja/Beban Keperluan Perkantoran	1,195,395,163	902,912,154	292,483,009	Kesalahan pembenanan MAK senilai Rp307.363.009,00 digunakan untuk pengadaan persediaan dan Rp14.880.000,00 untuk pengadaan rak besi
02	521113	Belanja/Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	196,214,336	(196,214,336)	Kesalahan pembenanan MAK senilai Rp196.214.336,00 yang digunakan untuk pembelian obat-obatan dan dicatat sebagai penambahan nilai persediaan
03	521114	Belanja/Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108,147,000	108,147,000	-	
04	521115	Belanja/Beban Honor Operasional Satuan Kerja	263,600,000	263,600,000	-	
05	521119	Belanja/Beban Barang Operasional Lainnya	60,325,000	60,325,000	-	
06	521211	Belanja/Beban Bahan	126,552,000	126,552,000	-	
07	521213	Belanja/Beban Honor Output Kegiatan	79,155,000	79,155,000	-	
08	521219	Belanja/Beban Barang Non Operasional Lainnya	872,716,500	872,716,500	-	
09	522112	Belanja/Beban Langganan Telepon	51,067,036	51,067,036	-	
10	522141	Belanja/Beban Sewa	359,456,000	359,456,000	-	
11	522151	Belanja/Beban Jasa Profesi	299,000,000	299,000,000	-	
Total			3,415,413,699	3,319,145,026	96,268,673	

Pada tahun 2016 Beban Barang dan Jasa pada LO lebih besar nilainya dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA. Beban Barang dan Jasa adalah Rp3.415.413.699,00 sedangkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah Rp3.319.145.026,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp96.268.673,00, yang dikarenakan adanya kesalahan pembeban Mata Anggaran Kegiatan (MAK).

Beban Pemeliharaan
Rp2.044.597.595,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.044.597.595,00 dan Rp1.967.927.500,00.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227,486,700	219,789,500	7,697,200	3.50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,686,078,469	1,676,395,151	9,683,318	0.58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,838,400	45,680,100	22,158,300	48.51
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57,379,406	25,188,455	32,190,951	127.80
Beban Persediaan suku cadang	5,814,620	874,294	4,940,326	565.06
Jumlah	2,044,597,595	1,967,927,500	76,670,095	3.90

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp76.670.095,00 atau 3,90 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015, karena meningkatnya kebutuhan pemeliharaan aset operasional kantor.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp46.474.204.301,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp46.474.204.301,00 dan Rp70.189.717.184,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	39,748,307,335	57,142,730,573	(17,394,423,238)	(30.44)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(151,882,554)	(1,095,296,111)	943,413,557	(86.13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,007,930,000	693,080,000	314,850,000	45.43
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(150,000)	-	(150,000)	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	907,541,000	137,360,000	770,181,000	560.70
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(1,500,000)	(280,000)	(1,220,000)	435.71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,677,914,400	12,327,523,222	(7,649,608,822)	(62.05)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(2,100,000)	(1,950,000)	(150,000)	7.69
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	337,825,370	986,549,500	(648,724,130)	(65.76)
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(49,681,250)	-	(49,681,250)	100.00
Jumlah	46,474,204,301	70,189,717,184	(23,715,512,883)	(33.79)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp23.715.512.883,00 atau 33,79 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015, karena adanya instruksi Presiden tentang penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (*Self Blocking*).

Pejelasan Beda LRA dan LO Belanja Perjalanan

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Perjalanan			Keterangan
			LO	LRA	Selisih	
01	524111	Beban/Belanja Perjalanan Biasa	39,748,307,335	39,739,828,235	8,479,100	selisih senilai Rp8.479.100,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 yang disetor ditahun 2016
02	524111	Pengembalian Beban/Belanja Perjalanan Biasa	(151,882,554)	(151,882,554)	-	
03	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,007,930,000	1,007,930,000	-	
04	524113	Pengembalian Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(150,000)	(150,000)		
05	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	907,541,000	907,541,000	-	
06	524114	Pengembalian Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(1,500,000)	(1,500,000)	-	
07	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,677,914,400	4,677,914,400	-	
08	524119	Pengembalian Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(2,100,000)	(2,100,000)	-	
09	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	337,825,370	337,825,370		
10	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(49,681,250)	(49,681,250)		
Total			46,474,204,301	46,465,725,201	8,479,100	

Pada Tahun 2016 Realisai Beban Perjalanan Dinas pada LO lebih besar nilainya dibandingkan dengan Realisasi Perjalanan Dinas pada LRA. Beban Perjalanan Dinas adalah Rp35.037.751.304,00 sedangkan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas adalah Rp35.029.272.204,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp8.479.100,00, yang disebabkan karena pada beban perjalanan biasa pada LO terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2015 yang disetorkan ditahun 2016 senilai Rp8.479.100,00, sehingga dilakukan jurnal balik penyesuaian Beban Perjalanan Biasa (debit) pada Belanja Barang Dibayar Dimuka (kredit) maka nilai beban perjalanan biasa pada LO nilainya bertambah.

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp73.440.000,00.

Pada Itjentan akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada tahun 2015 adalah perlengkapan pendukung untuk kegiatan Sosialisasi dan Forum Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kegiatan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) berupa seminar kit, doorprice dan perlengkapan lainnya yang dibagikan kepada peserta. Seminar kit, doorprice dan perlengkapan lainnya yang dibagikan kepada peserta dalam suatu kegiatan tidak dicatat sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sehingga pada tahun 2016 tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.884.107.008,00

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp2.884.107.008,00 dan Rp4.570.786.210,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,854,698,968	1,745,814,670	1,108,884,298	63.52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5,905,540	5,905,540	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap	-	2,819,066,000	(2,819,066,000)	(100.00)
Jumlah Penyusutan	2,860,604,508	4,570,786,210	(1,710,181,702)	(37.42)
Beban Amortisasi	23,502,500	-	23,502,500	-
Jumlah Amortisasi	23,502,500	-	23,502,500	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,884,107,008	4,570,786,210	(1,686,679,202)	(36.90)

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp1.686.679.202,00 atau 36,90 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2015 , karena pada Tahun 2016 tidak terdapat Penyusutan Aset Tetap Lainnya, namun demikian pada Tahun 2016 ada penambahan beban penambahan Amortisasi untuk Software.

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp75.750,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang mencatat estimasi ketidaktertagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing senilai Rp75.750,00 dan nihil.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dari pegawai dari PPHP yang saatnya bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang pengembaliannya termasuk kategori lancar karena dipotong oleh PUMK Gaji di Ijtentan setiap bulan.

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp254.955.017,00

D.10 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing Rp254.955.017,00 dan Rp99.367.100,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	83,283,274	65,400,000	17,883,274	27.34
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	171,671,743	33,967,100	137,704,643	405.41
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	254,955,017	99,367,100	155,587,917	156.58

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp83.283.274,00 merupakan pendapatan lelang BMN Itjentan Rusak Berat senilai Rp103.348.990,00 dikurangi beban pelepasan aset senilai Rp20.065.716,00. Beban Pelepasan aset senilai Rp20.065.716,00 adalah Nilai Perolehan aset yang diusulkan penghapusan ke pengelola senilai Rp1.721.897.420,00 dikurangi Penyusutan Transaksional senilai Rp1.701.831.704,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp171.671.743,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp194.627.789,00 yang merupakan penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2015 yang diterima ditahun 2016 yaitu masing-masing sebesar Rp51.857.400,00 dan Rp93.767.008,00 serta pendapatan dari penyesuaian nilai persediaan senilai Rp49.003.381
- b. Beban Penyesuain Nilai Persediaan senilai Rp22.956.046,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp9.048.454.129,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9.048.454.129 dan Rp3.677.672.363,00 .

Surplus(defisit) LO

Rp(77.911.742.115,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah defisit sebesar Rp(77.911.742.115,00) dan Rp(102.210.852.305,00). Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

nihil

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset yang terjadi pada tahun berjalan. Penyesuaian nilai aset untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp4.081.868,00.

Koreksi Nilai

Aset Tetap

Rp(421.356.083,00)

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp(421.356.083,00) dan Rp99.110.000,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2016 senilai Rp(421.356.083,00) yang merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp393.063.845,00 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi senilai Rp(814.419.928,00). Koreksi nilai tersebut adalah Jurnal koreksi BMN atas Aset Tetap dan Aset tak Berwujud beserta penyusutan dan amortisasinya.

Transaksi Antar Entitas

Rp59.228.297.501,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp77.323.456.943,00 dan Rp107.478.442.203,00. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 terdiri dari akun Ditagihkan ke Entitas Lain (Total Realisasi Belanja) senilai Rp77.450.501.469,00 dikurang Diterima dari Entitas Lain (Total PNBP) senilai Rp238.269.718,00 dan ditambah Transfer Masuk senilai Rp111.225.192,00.

Transfer masuk senilai Rp Rp111.225.192,00 terdiri dari transfer masuk aset dari Setjen kepada Itjentan berupa :

- a. Aset-aset Tetap Ex. PPHP dengan Nilai Buku senilai Rp89.372.942,00 yaitu Total Harga Perolehan senilai Rp453.757.856,00 yang dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp364.384.914,00.
- b. Aset berupa 2 unit Laptop dengan Nilai Buku senilai Rp21.852.250,00 yaitu Total Harga Perolehan senilai Rp24.974.000,00 yang dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp3.121.750,00.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp(1.009.641.255,00)

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Entitas untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(1.009.641.255,00) dan Rp5.370.781.766,00. Kenaikan/Penurunan Entitas per 31 Desember 2016 merupakan Ekuitas Awal senilai Rp9.048.454.129,00 dikurang Ekuitas Akhir senilai Rp8.038.812.874,00, sehingga Ekuitas per 31 Desember 2016 terjadi penurunan senilai Rp1.009.641.255,00.

Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2016 dikarenakan menurunnya total realisasi belanja yang disebabkan adanya Instruksi Presiden tentang Penghematan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (*Self Blocking*).

Ekuitas Akhir
Rp8.038.812.874,00

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing - masing sebesar Rp8.038.812.874,00 dan Rp9.048.454.129,00.

Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2016 senilai Rp8.038.812.874,00 adalah Ekuitas Awal senilai Rp9.048.454.129,00 dikurang penurunan Ekuitas senilai Rp1.009.641.255,00.

Ekuitas Akhir pada periode 31 Desember 2016 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca periode 31 Desember 2016.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Pada Semester I Tahun Anggaran 2016 terdapat lelang 2 unit kendaraan roda 4 yaitu 1 unit kendaraan Toyota Kijang dan 1 unit kendaraan minibus (kendaraan operasional jemputan). Kendaraan tersebut telah dilelang pada tahun 2015 namun karena harga penawaran terlalu tinggi, sehingga pada tahun 2015, dua unit kendaraan tersebut belum laku terjual, tetapi sudah keluar dari neraca akun peralatan dan mesin menjadi pengajuan aset rusak berat ke pengelola. Sehingga pada semester I tahun 2015 tidak terdapat mutasi keluar atas nilai 2 unit kendaraan tersebut.
- b. Realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA per 31 Desember 2016 senilai Rp2.124.658.719,00 sedangkan Beban Pemeliharaan (Non Persediaan) pada LO senilai Rp1.981.403.569, sehingga terdapat selisih lebih kecil pada Beban Pemeliharaan (Non Persediaan) pada LO senilai Rp143.255.150,00.

Penjelasan Beda LRA dengan LO Belanja Pemeliharaan (Non Persediaan)

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Perjalanan			Keterangan
			LO	LRA	Selisih	
01	523111	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227,486,700	227,486,700	-	
02	523121	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,686,078,469	1,790,100,469	(104,022,000)	selisih disebabkan karena terdapat pengadaan toner fotocopy yang seharusnya sebagai penambahan nilai persediaan, sehingga dilakukan jurnal penyesuaian : persediaan belum diregister (debit) dan beban pemeliharaan alsin (kredit)
03	523129	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,838,400	107,071,550	(39,233,150)	selisih disebabkan karena terdapat pengadaan alat alat listrik yang seharusnya sebagai penambahan nilai persediaan, sehingga dilakukan jurnal penyesuaian : persediaan belum diregister (debit) dan beban pemeliharaan alsin lainnya (kredit)
Total			1,981,403,569	2,124,658,719	(143,255,150)	

- c. Terdapat Persediaan belum diregister minus Rp32.106.477,00 hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

Total pembelian (aplikasi persediaan)	1,406,582,222					
Pendapatan Penyesuaian Nilai	49,003,381					
Beban Penyesuain Nilai Persediaan	(22,956,046)					
	1,432,629,557					
MAK 521811	1,374,475,745					
selisih	58,153,812					
(selisih senilai Rp58.153.812,00 terdiri dari Pendapatan dan beban senilai Rp26.047.335,00 dan persediaan belum diregister senilai Rp32.106.477,00)						
Keterangan	Jumlah Total Per akun					Total Pembelian
	521111	521113	521811	523121	523129	
pembelian persediaan	623,752,236	196,214,336	443,360,500	104,022,000	39,233,150	1,406,582,222
MAK 521811			(1,374,475,745)			
konsumsi rapat	(931,115,245)		(931,115,245)			
persediaan belum diregister	(307,363,009)	196,214,336	-	104,022,000	39,233,150	32,106,477
Total pembelian (aplikasi persediaan)		1,406,582,222				
MAK 521811		(1,374,475,745)				
Persediaan belum diregister		32,106,477				

Terhadap akun persediaan belum deregister telah dilakukan jurnal penyesuaian sebagaimana terlampir pada lampiran Memo Penyesuaian.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Berdasarkan surat dari Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian kepada Kepala KPPN Jakarta V dengan surat Nomor B.1083/KU.070/H/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Itjentan dan surat Nomor B.1084/KU.070/H/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Permintaan Perubahan Data Supplier, maka Nama Pemilik Rekening Itjentan berubah sebagai berikut :

Nomor Rekening	Nama Rekening	
	Semula	Menjadi
127-00-8700019-4	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	BPG 139 Itjen Kementan

Saldo Rekening Itjentan per 31 Desember 2016 adalah nihil. Data tersebut berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2016. (Rekening Koran terlampir).

F.4. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK